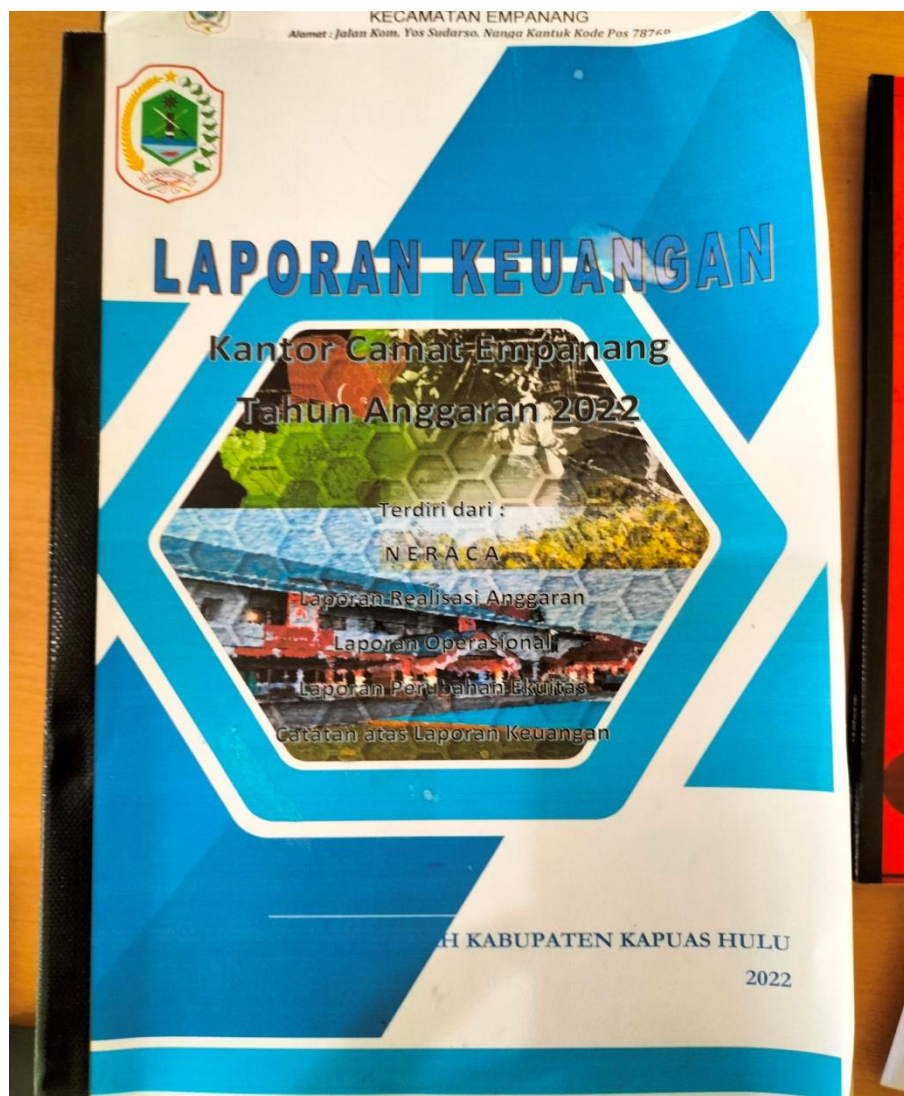


LRA 2022
KECAMATAN EMPANANG



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Per 31 Desember 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMPANANG

Alamat : Jalan Kom. Yos Sudarso. Nanga Kantuk Kode Pos 78768

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Operasional;
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2022

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 kami menyajikan Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Demikianlah laporan ini kami buat atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Empanang, 31 Desember 2022
Pengguna Anggaran

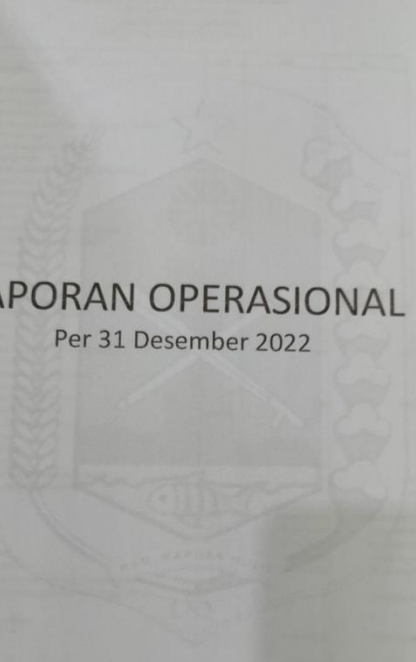
Drs. DONATUS DUDANG
NIP. 19650128 199302 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMPANANG
Alamat: Jalan Kiri, Yos Sudarso, Nanga Kantak Kode Pos 78742

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMPANANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

		(Rupiah: 1.000)			
NO.	URAIAN	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengkajian Koleksi Daerah Yang Dipertahankan				0,00
6	Lain-lain PAD yang sah				0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (2 s.d 6)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERMISYAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Permisyan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	0,00
17	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	0,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Total Pendapatan Transfer (19 + 22 + 25)	0,00	0,00	-	0,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Dana Ciptaan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	905.529.074,00	909.930.233,00	100,49	1.008.217.170,00
33	Belanja Barang dan Jasa	515.875.330,00	514.952.930,00	98,82	469.045.400,00
34	Bunga				
35	Subsidi				
36	Hibah	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	
37	Berkas Sosial				
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s.d 42)	1.421.404.374,00	1.437.883.163,00	101,24	1.477.262.570,00
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah				
41	Belanja Perbaikan dan Mesin	47.270.000,00	47.270.000,00	100,00	7.000.000,00
42	Belanja Gedung dan Bangunan				0,00
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan				
44	Belanja Alat Tetap Lainnya				
45	Belanja Alat Lainnya				
46	Jumlah Belanja Modal (40 s.d 51)	47.270.000,00	47.270.000,00		7.000.000,00
47	JUMLAH BELANJA	1.468.674.374,00	1.485.153.163,00	100,20	1.484.262.570,00
48	SURPLUS/DEFISIT (23 - 52 - 54)	-1.468.674.374,00	-1.485.153.163,00	100,20	-1.484.262.570,00

LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KESAMATAN KAMPANANG
LAPORAN EMERGENSIAL
PER 31 DESEMBER 2022 HAN 2021

[illegible]

BEBAN TRANSFER	7.5.2.2		0
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak			
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			
Beban Transfer Keuangan Lainnya			
Jumlah Beban Transfer		0,00	0,00
JUMLAH BEBAN DAN TRANSFER		1.545.446.725,46	1.552.254.262,46
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	07:05:03	-1.545.446.725,46	-1.552.254.262,46
SURPLUS NON OPERASIONAL	7.5.4.1	0,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Surplus Non Operasional		0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	7.5.4.2		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-1.545.446.725,46	-1.552.254.262,46
PENDAPATAN LUAR BIASA	07:05:05		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0	0
BEBAN LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	07:05:06	-1.545.446.725,46	-1.552.254.262,46

31 Desember 2022

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



Bab I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan Kecamatan Empanang per 31 Desember 2022, yang meliputi Aset baik Aset Lancar maupun Aset Tetap, Kewajiban baik Kewajiban Jangka Panjang maupun Kewajiban Jangka Pendek, Ekuitas baik Ekuitas Dana Lancar maupun Ekuitas Dana Investasi dan realisasi Belanja yang terjadi selama tahun 2021 serta saldo Aset tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tujuan kebijakan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penyajian Informasi laporan keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kecamatan Empanang menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memadai kepada pengguna Laporan Keuangan ini dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) PP No. 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bab II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro.

Dalam perkembangannya, pranata ekonomi memelihara kelangsungan sistem nilainya tidak pernah lepas dari keterkaitan dengan ruang-ruang sosial lainnya baik itu pranata politik, pendidikan, kemasyarakatan atau keluarga maupun agama. Disini dapat diamati karakteristik hubungan pranata sosial dalam masyarakat terkini yang cenderung bersifat kompleks, fungsional, independen, serta memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mampu menjabarkan sebuah pola hubungan yang bersifat sistemik konsekuensi dunia pendidikan dengan sektor ekonomi masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang erat, di mana kedua komponen lembaga tersebut merupakan aset negara yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati dan cermat.

Secara lebih khusus hubungannya menyangkut modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang menjadi tiga faktor pokok sebagai masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian infrastruktur dan sarana-sarana yang melayani kehidupan masyarakat kini beralih tangan menjadi wewenang negara. Secara lebih luas otomatis perubahan struktur sosial politik berdampak bergesernya format hubungan antara lembaga sosial ekonomi dengan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tetap berkorelasi kuat dengan praktik pendidikan sebagai pencetak operator pelaksana transformasi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Bagaimanapun pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam SDM semakin Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Kalis menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

Bab III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Empanang

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Empanang Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan tingkat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	1.386.921.374,00	1.390.400.033,00	100,25
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.416.000,00	3.416.000,00	100
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.376.000,00	1.376.000,00	100
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	100
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.440.000,00	1.440.000,00	100

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	632.869.074,00	637.276.233,00	100,53
1	Belanja Gaji Pokok PNS	422.192.770,00	422.153.500,00	99,99
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	42.011.373,00	47.163.984,00	112,26
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	39.198.000,00	40.840.000,00	104,19
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.188.000,00	14.960.000,00	98,50
5	Belanja Tunjangan Beras PNS	27.570.294,00	27.012.860,00	97,98
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	911.491,00	904.657,00	99,25
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.004,00	7.959,00	113,64
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.064.984,00	27.334.750,00	94,05
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	863.005,00	857.531,00	99,41
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.586.028,00	2.573.792,00	99,41
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	253.273.125,00	254.061.000,00	100,31

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.660.000,00	72.660.000,00	100
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72.660.000,00	72.660.000,00	100

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.957.000,00	4.957.000,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.057.000,00	2.057.000,00	100

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kecamatan Empananag adalah merupakan entitas pelaporan yang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Organisasi Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dimulai pada tahun Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pengukuran Penerapan Kebijakan Akuntansi Kebijakan Akuntansi Pencatatan

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 5.1.1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang menambah SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 5.1.2. Belanja adalah pengeluaran oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang mengurangi SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.
- 5.1.3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana bagi Hasil.
- 5.1.4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi sedang pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman pada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

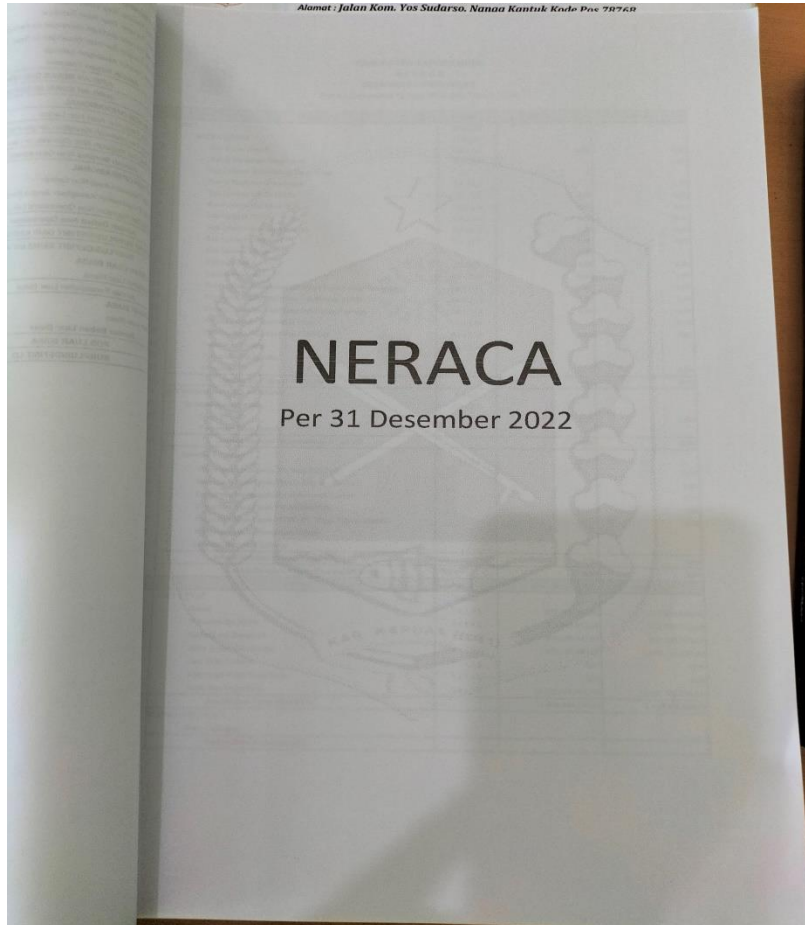
Bab VI
P e n u t u p

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kecamatan Emapanang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Pengguna Anggaran,

Drs. DONATUS DUDANG
NIP. 19650128 199302 1 001

NERACA
Dan
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS





KABUPATEN KAPUAS HULU

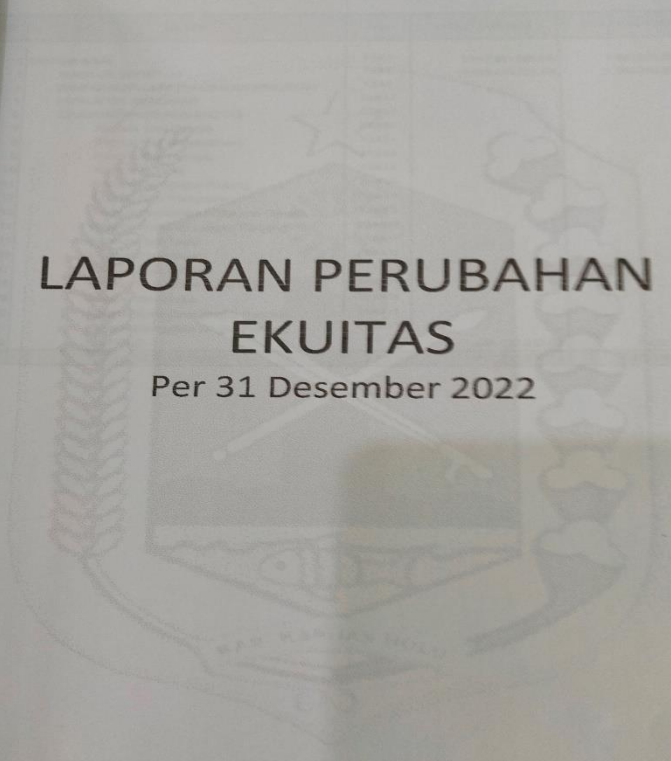
NERACA

KECAMATAN EMPANANG

Per 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	ASET	4.046.000		
2	ASET LANCAR	7.453		
3	Kas di Kas Daerah	7.433,3	0,00	0,00
4	Kas di Simpanan Pengeluaran	7.433,2	-	0,00
5	Kas Lainnya di Simpanan Pengeluaran	-	-	0,00
6	Kas di Simpanan Perantara	7.433,3	0,00	0,00
7	Kas Lainnya Kas di Simpanan	7.433,4	0,00	0,00
8	Kas Lainnya Kas Simpanan	7.433,3	0,00	0,00
9	Kas Lainnya KETUP	7.433,6	0,00	0,00
10	Kas Lainnya Kas Simpanan	7.433,3	0,00	0,00
11	Kas Lainnya - Kas Simpanan	7.433,3	0,00	0,00
12	Kas Lainnya - Saldo FYK	0,00	0,00	0,00
13	Pinjaman Pihak	7.433,4	0,00	0,00
14	Pinjaman Pihak	7.433,3	0,00	0,00
15	Pinjaman Pihak Pengeluaran Ketersediaan Daerah yang Dipisahkan	7.433,3	0,00	0,00
16	Pinjaman Lain Kas PAK Yang Sub Pinjaman	7.433,2	0,00	0,00
17	Pinjaman Lain Kas PAK Yang Sub Pinjaman Lainnya	7.433,3	0,00	0,00
18	Pinjaman Transaksi Perantara	7.433,3	-	0,00
19	Pinjaman Transaksi Pihak	7.433,3	0,00	0,00
20	Pinjaman Transaksi Pihak	7.433,3	-	0,00
21	Pinjaman Transaksi	-	-	-
22	Pinjaman Transaksi	-	-	-
23	Pinjaman	7.433,3	0,00	0,00
24	Jumlah Aset Lancar (2 s.d 23)		8,00	8,00
25	INVENTARI JANGKA PANJANG	7.453		
26	Inventaris Perantara	7.433,3	0,00	0,00
27	Daftar Pengeluaran	-	-	-
28	Pinjaman Transaksi	-	-	-
29	Jumlah Inventaris Perantara (27 s.d 28)		8,00	8,00
30	Inventaris Perantara	7.433,3	-	0,00
31	Perantara Modal pada PT. Bank KALIMATI	-	-	0,00
32	Perantara Modal pada PT. BANK KALIMATI	-	-	0,00
33	Perantara Modal pada PT. BANK KALIMATI	-	-	0,00
34	Perantara Modal pada PT. BANK KALIMATI	-	-	0,00
35	Perantara Modal pada PT. BANK KALIMATI	-	-	0,00
36	Perantara Modal pada PT. BANK KALIMATI	-	-	0,00
37	Perantara Modal pada PT. BANK KALIMATI	-	-	0,00
38	Perantara Modal pada PT. BANK KALIMATI	-	-	0,00
39	Perantara Modal pada PT. BANK KALIMATI	-	-	0,00
40	Perantara Modal pada PT. BANK KALIMATI	-	-	0,00
41	Perantara Modal pada PT. BANK KALIMATI	-	-	0,00
42	Jumlah Inventaris Perantara (39 s.d 40)		8,00	8,00
43	Jumlah Inventaris Perantara (24 s.d 42)		8,00	8,00
44	ASET TETAP	7.433		
45	Tanah	7.433,3	837.410.000,00	837.410.000,00
46	Perantara dan Mula	7.433,2	333.613.913,66	472.913.913,66
47	Gedung dan Bangunan	7.433,3	900.188.543,64	900.188.543,64
48	Jalan, Jembatan dan Jaringan	7.433,4	1.470.180.287,62	1.470.180.287,62
49	Aset Tetap Lainnya	7.433,3	0,00	0,00
50	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.433,3	0,00	0,00
51	Akumulasi Penyusutan	7.433,3	(2.162.014.502,79)	(2.162.782.776,31)
52	Jumlah Aset Tetap (45 s.d 51)		1.677.896.948,89	1.677.896.948,89
53	DANA CADANGAN			
54	Dana Cadangan	-	-	-
55	Jumlah Dana Cadangan (54)		-	-

58	ASET LAINNYA	7.4.1.5		
59	Tupahan Penjualan Angsuran	7.4.1.5.1	-	-
60	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
61	Tuntutan Ganti Rugi	7.4.1.5.2	0,00	0,00
62	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.4.1.5.3	-	-
63	Kombinasi dengan Pihak Ketiga	7.4.1.5.4	-	-
64	Aset Tak Berwujud	7.4.1.5.5	0,00	0,00
65	Ancerisasi Aset Tak Berwujud	7.4.1.5.6	-	-
66	Aset Lain-lain	7.4.1.5.7	0,00	0,00
67	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	7.4.1.5.8	-	-
	Kas yang dibatasi Penggunaannya	7.4.1.5.9	-	-
68	Jumlah Aset Lainnya (59 s/d 67)		0,00	0,00
69	JUMLAH ASET (24 + 42 + 52 + 56 + 68)		1.579.360.276,13	1.617.891.968,59
71	KEWAJIBAN	07:04:02		
72	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.4.2.1		
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		-	-
74	Utang Bunga		-	-
75	Utang Jasa Medis		-	-
76	Utang Belanja	7.4.2.1.3	21.762.000,00	0,00
77	Utang Jangka Pendek- Utang Kelebihan Transfer		-	-
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.4.2.1.3	-	-
79	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (73 s/d 78)		21.762.000,00	0,00
81	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.4.2.2		
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
83	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
84	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
85	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank		-	-
86	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
87	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
88	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (82 s/d 87)		-	-
89	JUMLAH KEWAJIBAN (80 + 88)		21.762.000,00	0,00
90	EKUITAS DANA			
91	JUMLAH EKUITAS DANA	07:04:03	1.557.598.276,13	1.617.891.968,59
92	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	07:04:04	1.579.360.276,13	1.617.891.968,59



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMPANANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO.	URAIAN	Ref	PER 31 DES 2022	PER 31 DES 2021
1				
2	EKUITAS AWAL	7.3.8.1	1.617.891.968,59	1.587.883.661,05
3	SURPLUS/ DEFISIT LO	7.3.8.2	(1.545.446.725,46)	(1.552.254.262,46)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/	7.3.8.3	-	-
5	KESALAHAN MENDASAR :	7.3.6.3.1	-	-
6	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7.3.6.3.2	-	-
7	Koreksi Kas Daerah	7.3.6.3.3	-	-
8	Koreksi Kas di Bendahara	7.3.6.3.4	-	-
9	Koreksi Kas Lainnya	7.3.6.3.5	-	-
10	Koreksi Piutang	7.3.6.3.6	-	-
11	Koreksi Penyisihan Piutang	7.3.6.3.7	-	-
12	Koreksi Nilai Persediaan	7.3.6.3.8	-	-
13	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	7.3.6.3.9	-	-
14	Koreksi Investasi Jangka Panjang	7.3.6.3.10	-	-
15	Koreksi Aset Tetap	7.3.6.3.11	-	-
16	Koreksi Penyusutan	7.3.6.3.12	-	-
17	Koreksi Aset lainnya	7.3.6.3.13	-	-
18	Koreksi Penyisihan Ganti Rugi	7.3.6.3.14	-	-
19	Koreksi Amortisasi	7.3.6.3.15	-	-
20	Koreksi Kewajiban jangka Pendek	7.3.6.3.16	-	-
21	Koreksi Kewajiban jangka Panjang	7.3.6.3.17	-	-
22	RK-PPKD		1.485.153.033,00	1.482.262.570
	EKUITAS AKHIR	7.7.4	1.557.598.276,13	1.617.891.968,59

DAFTAR ASET 2022
KANTOR KECAMATAN EMPANANG



[illegible][illegible]

DAFTAR ASET
TAHUN 2022

[illegible]

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
INTRA COUNTABLE

**REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
INTRA COUNTABLE**

SKPD : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN EMPANANG
KABUPATEN I KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI : Kalimantan Barat

Halaman 1 dari 2 Halaman

No. Urut	Delenggan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	01		TANAH	12	957.410.000,00	
		1.3.1.01	TANAH	12	957.410.000,00	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	88	513.615.913,84	
		1.3.2.01	ALAT BESAR	0	0,00	
		1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	9	161.108.240,82	
		1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	0,00	
		1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	0	0,00	
		1.3.2.06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	61	166.727.466,51	
		1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	5	24.526.036,87	
		1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0,00	
		1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	0	0,00	
		1.3.2.09	ALAT PERSENIJAJAN	0	0,00	
		1.3.2.10	KOMPUTER	23	161.254.147,46	
		1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	0	0,00	
		1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	0	0,00	
		1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0,00	
		1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0,00	
		1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0,00	
		1.3.2.16	ALAT PERAGA	0	0,00	
		1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0,00	
		1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	0	0,00	
		1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0	0,00	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	6	900.186.543,64	
		1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	6	900.186.543,64	
		1.3.3.02	MONUMEN	0	0,00	
		1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	0	0,00	
		1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0,00	
		1.3.3.05	RAMBU - RAMBU	0	0,00	
4	04		JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	3	1.470.160.287,62	
		1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	2	1.214.826.922,21	
		1.3.4.02	BANGUNAN AIR	0	0,00	
		1.3.4.03	INSTALASI	1	255.333.365,41	
		1.3.4.04	JARINGAN	0	0,00	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0,00	
		1.3.5.02	BARANG BERCORAK PESENAN/KEJUJAYAAN/OLAH RAGA	0	0,00	
		1.3.5.03	HEWAN	0	0,00	
		1.3.5.04	BOTA PERAJAAN	0	0,00	
		1.3.5.05	TANAMAN	0	0,00	
		1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0,00	
		1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0,00	
6	06		KONSTRUKSI DALAM PENGERAJAN	0	0,00	
		1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERAJAN	0	0,00	
7	07		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.3.6.08	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	

Halaman 2 dari 2 Halaman

1	2	3	4	5	6	7
			TOTAL	109	3.741.374.744,92	

Mengetahui
Kepala SKPD

Pengurus Barang

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
INTRA COUNTABLE

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
EXTRA COUNTABLE

SKPD
KABUPATEN / KOTA
PROVINSI

7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN EMPANG
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Kalimantan Barat

Halaman 1 dari 2 Halaman

No. Urut	Balangan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
1	01.		TANAH	0	0,00	
		1.3.1.01	TANAH	0	0,00	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	261	48.791.434,57	
		1.3.2.01	ALAT BESAR	0	0,00	
		1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	0	0,00	
		1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	0,00	
		1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	0	0,00	
		1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	257	45.433.597,45	
		1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	0	0,00	
		1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0,00	
		1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	0	0,00	
		1.3.2.09	ALAT PERSENIATAAN	0	0,00	
		1.3.2.10	KOMPUTER	4	3.357.847,52	
		1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	0	0,00	
		1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	0	0,00	
		1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0,00	
		1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0,00	
		1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0,00	
		1.3.2.16	ALAT PERAGA	0	0,00	
		1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0,00	
		1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	0	0,00	
		1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	3	18.750.000,00	
		1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	3	18.750.000,00	
		1.3.3.02	MONUMEN	0	0,00	
		1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	0	0,00	
		1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0,00	
		1.3.3.05	RAMBU - RAMBU	0	0,00	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2	54.948.270,47	
		1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	1	48.552.270,47	
		1.3.4.02	BANGUNAN AIR	0	0,00	
		1.3.4.03	INSTALASI	1	6.394.000,00	
		1.3.4.04	JARINGAN	0	0,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0,00	
		1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIMAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0	0,00	
		1.3.5.03	HEWAN	0	0,00	
		1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	0	0,00	
		1.3.5.05	TANAMAN	0	0,00	
		1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0,00	
		1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.3.6.08	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	

Halaman 2 dari 2 Halaman

1	2	3	4	5	6	7
			TOTAL	266	122.487.705,44	

Mengetahui
Kepala SKPD

Pengurus Barang

[Signature]

